



PEMUTAKHIRAN, ANALISIS DAN PEMANFAATAN DTKS KOTA TANGERANG

PESAN UTAMA

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berisi data dan informasi tentang sosial ekonomi dari 40% rumah tangga termiskin yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program-program perlindungan sosial dan sektoral di daerah.
- DTKS dapat dianalisis secara sektoral dan spasial sampai tingkat kelurahan/kelurahan yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan berbasis bukti/data di daerah.
- Secara umum, pemutakhiran DTKS di Kota Tangerang cukup tinggi dengan prosentase perbaikan hampir 80% dan usulan baru 3,2%. Prediksi akurasi pemutakhiran data juga tergolong tinggi.
- Sebaran jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di tingkat kelurahan perlu mendapat perhatian dan pemetaan lebih lanjut, terutama kelurahan-kelurahan dengan penduduk miskin dan rentan miskin yang cukup banyak serta jumlah anggota rumah tangga/keluarga yang besar.
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid masih cukup banyak, sekitar 12% dari total individu dalam DTKS, yang dapat menghambat akses penduduk miskin dan rentan miskin terhadap program bantuan sosial dan layanan dasar lainnya.
- Penduduk miskin dan rentan miskin dengan kepala keluarga perempuan berusia di atas 60 tahun yang tidak bekerja dan menderita penyakit kronis masih ditemukan di sejumlah kelurahan.
- Mayoritas penduduk dalam DTKS mempunyai lapangan usaha di bidang industri pengolahan dengan status pekerjaan sebagai buruh/karyawan swasta. Sementara status pekerjaan kepala rumah tangga, mayoritas adalah buruh industri pengolahan dan buruh lainnya, diikuti usaha sendiri perdagangan dan usaha sendiri lainnya.
- Proporsi penduduk miskin dan rentan miskin dalam DTKS yang sekaligus menerima beberapa program bansos/perlindungan sosial masih rendah, menunjukkan kecenderungan serupa dengan yang ada di tingkat nasional. Sementara secara teoritis, kelompok termiskin seperti penerima PKH berhak sekaligus menerima Program Kartu Sembako/BPNT dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Keaktifan Pemutakhiran DTKS

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang aktif melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Hingga Januari 2020, prosentase perbaikan DTKS di Kota Tangerang mencapai hampir 80% dengan usulan baru 3,2%, dan termasuk kategori perbaikan tinggi dengan prediksi akurasi data yang juga tinggi. Dengan tingkat keaktifan ini, Kota Tangerang menduduki peringkat 46 diantara seluruh kabupaten/kota di Indonesia dalam rangking verifikasi dan validasi DTKS.

Sementara itu, seperti terlihat pada Gambar 1, hampir tidak ada perbaikan DTKS untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk memastikan penduduk miskin dan rentan miskin dalam DTKS menerima kedua program tersebut.

Gambar 1: Keaktifan Pemutakhiran DTKS Kabupaten/Kota s/d Januari 2020

Kode	Kabupaten/Kota	Provinsi	Prosentase Perbaikan DTKS	Prosentase Usulan Baru DTKS	Prosentase Perbaikan BSP	Prosentase Perbaikan PBI	Rangking Verval Nasional
3671	Kota Tangerang	Banten	79,560	3,200	0,000	0,000	46
3674	Kota Tangerang Selatan	Banten	45,600	10,030	0,000	0,000	118
3603	Tangerang	Banten	0,000	0,000	0,000	0,000	458

Showing 1 to 3 of 3 entries (filtered from 514 total entries)

Persentase Perbaikan: **Tinggi**
Prediksi Akurasi Data: **Tinggi**

Sebaran DTKS Berbasis Kelurahan

Dalam DTKS, terdapat 248.492 jiwa atau 65.313 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kota Tangerang, tersebar di 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Beberapa kelurahan yang memiliki penduduk miskin dan rentan miskin banyak, diantaranya tiga kelurahan di kecamatan Neglasari, yaitu Kelurahan Kedaung Wetan dengan 7.698 jiwa, kelurahan Neglasari 6.187 jiwa, dan kelurahan Selapajang Jaya 5.455 jiwa. Sementara yang paling sedikit penduduk miskin dan rentan miskinnya adalah kelurahan Sukaasih Kecamatan Tangerang, dengan hanya 390 jiwa.

Pola sebaran jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di tingkat kelurahan perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tangerang, terutama beberapa kelurahan dengan jumlah

penduduk miskin dan rentan miskin paling besar. Pemetaan lebih lanjut terkait tingkat kemiskinan dan kerentanan, faktor-faktor penyebab banyaknya penduduk miskin dan rentan miskin, serta potensi dan kebutuhan intervensi program di kelurahan-kelurahan tersebut perlu dilakukan.

Gambar 2:
Sebaran DTKS Berbasis Kelurahan



Rerata Jumlah Keluarga dan Individu Per Rumah Tangga

Selain sebaran jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di tingkat kelurahan, informasi penting yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah keluarga dan individu dalam rumah tangga. Informasi ini dapat membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi program dari rumah tangga atau keluarga miskin dan rentan miskin.

Secara umum, rerata jumlah keluarga dan individu per rumah tangga, masing-masing sebanyak 1,10 keluarga dan 4,47 individu. Beberapa kelurahan memiliki rerata jumlah keluarga dan/atau individu per rumah tangga yang cukup besar, diantaranya Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh dengan 1,56 keluarga dan Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda dengan 5,55 individu.

Gambar 3: Rerata Jumlah Keluarga dan Individu Per Rumah Tangga Berdasarkan Kelurahan

Selanjutnya

Sebaran DTKS

Rerata per Kelurahan

Rerata per Rukun Warga

Rerata per Rukun Tetangga

Rerata per RUC-RUC

Rerata Keluarga

Rerata Individu

PKH (JAT)

BSP (JAT)

Validitas NIK

Validitas NIK

Invalid

TABEL SEBARAN DTKS

Keca.	Desa/Wil.	Jumlah RUC	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Rerata Juml. Keluarga per RUC	Rerata Juml. Individu per RUC
JARANAN SELATAN	JARANAN SELATAN	130	233	183	1,18	4,42
	JARANAN UTARA	92	96	147	1,18	4,73
	Total	685	700	1.054	1,18	5,42
NEGLASARI	KAYANG ANYAM	175	196	275	1,10	4,81
	KAYANG SARI	260	285	382	1,29	4,64
	KEDAUANG BARU	743	303	533	1,28	4,05
	KEDAUANG WETAN	1925	937	1.814	1,14	4,42
	MEKANSARI	292	259	315	1,24	5,34
	NEGLASARI	477	434	575	1,20	4,57
PERIUK	SELARANG BARU	629	649	946	1,29	4,73
	Total	2.990	3.159	5.309	1,21	4,61
PERIUK	OCCANG BARU	818	221	333	1,17	4,05
	Total	3.808	3.380	5.642	1,21	4,61

NIK Invalid (Invalid)

Salah satu faktor yang memengaruhi akses penduduk miskin dan rentan miskin terhadap program perlindungan sosial dan layanan dasar lainnya adalah validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum terpadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Penduduk yang memiliki NIK tidak valid di Kota Tangerang masih cukup besar yaitu mencapai 28.711 jiwa atau sekitar 12% dari total individu dalam DTKS yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan. Terdapat dua kelurahan yang memiliki NIK tidak valid di atas 1.000 jiwa, yaitu kelurahan Kedaung Wetan dengan 1.814 jiwa dan kelurahan Jurumudi Baru dengan 1.252 jiwa.

Berdasarkan jenis program yang diterima, penerima Program Kartu Sembako/BPNT yang paling banyak memiliki NIK tidak valid yaitu, sebanyak 17.564 jiwa (61%) dari total NIK tidak valid, disusul penerima PKH sebanyak 11.056 jiwa (38.50%).

Gambar 4: Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tidak Valid berdasarkan Kelurahan

TABEL SEBARAN DTKS

Kec.	Desa/Kel.	Jumlah Rukn	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Rata-rata Juml. Keluarga per Rukn	Rata-rata Juml. Individu per Rukn
LABANGPILSELATAN	LABANGPILSELATAN	130	233	183	1,18	4,38
	LABANGPILSELATAN	92	96	149	1,10	4,70
	TOTAL	222	329	332	1,18	4,54
NEGLAGARI	ANTANG ANYAU	175	316	275	1,10	4,01
	KARANG SARI	266	292	382	1,09	4,64
	KEDJANG SARI	743	367	533	1,20	4,05
	KEDJANG METAR	795	937	1.814	1,14	4,47
	MELANGSARI	592	259	517	1,32	5,34
	NEGLASARI	477	434	776	1,20	4,57
	SELARANG JARA	226	649	196	1,28	4,73
TOTAL	2.990	3.158	5.309	1,21	4,61	
PERLUK	DEBANG RAYA	215	221	333	1,17	4,38
	TOTAL	215	221	333	1,17	4,38

Karakteristik Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga

Mayoritas kepala rumah tangga atau kepala keluarga miskin dan rentan berusia diantara 41-59 tahun, mencapai lebih dari setengah total rumah tangga atau total keluarga dalam DTKS. Sementara sekitar 25% kepala rumah tangga dan kepala keluarga berusia di atas 60 tahun.

Terdapat 5.313 Kepala Rumah Tangga dan 6.020 Kepala Keluarga yang berusia di atas 60 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan tidak bekerja. Sebaran tertinggi Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga berjenis kelamin perempuan dan tidak bekerja berada pada Desil 4+.

Diantara kepala rumah tangga dan kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan dan tidak bekerja, terdapat 784 dan 907 yang menderita penyakit kronis diantaranya hipertensi, masalah jantung, stroke, dan kanker atau tumor ganas. Seperti terlihat pada Gambar 5.b, sebagian besar dari kelompok Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga ini berada di desil 4+.

Gambar 5.a: Karakteristik Umum Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga



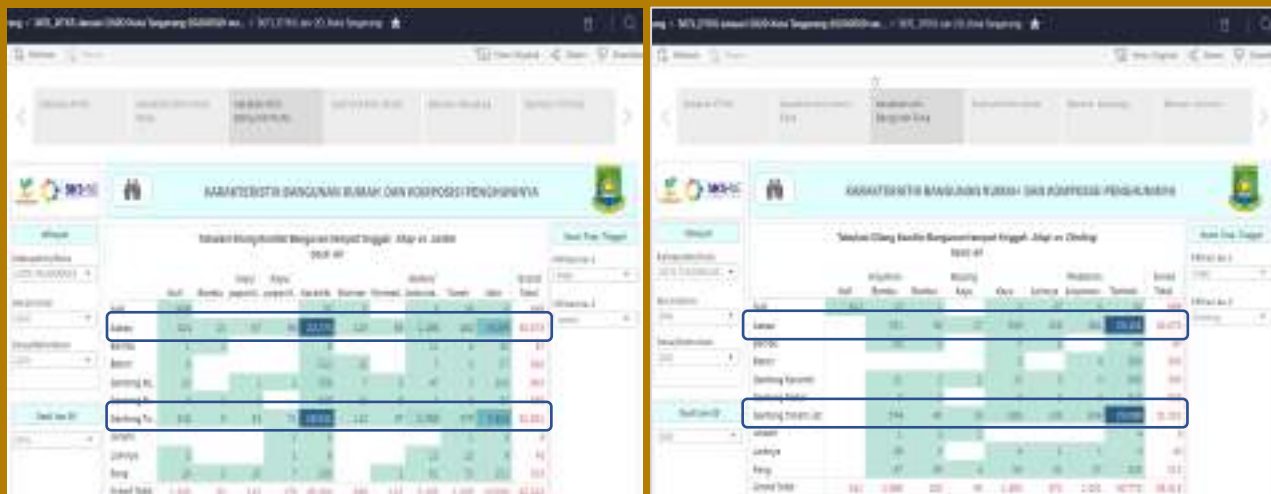
Gambar 5.b: Status Pekerjaan dan Jenis Penyakit Kepala Rumah Tangga/Kepala Keluarga



Karakteristik Bangunan Rumah Tangga

Mayoritas atap rumah penduduk yang ada di DTKS terbuat dari genteng tanah liat dan asbes, masing masing sebesar 31.291 dan 30.673 rumah tangga. Hampir 90% diantaranya beratap genteng tanah liat dan asbes dengan dinding berjenis tembok. Sementara, lebih dari 65% rumah penduduk dalam DTKS beratap asbes dan genteng tanah liat dengan lantai berjenis keramik.

Gambar 6: Kondisi Bangunan Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin



Karakteristik Individu dan Rumah Tangga Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas penduduk Kota Tangerang yang berada dalam DTKS mempunyai lapangan usaha di bidang industri pengolahan dengan status pekerjaan sebagai buruh/karyawan swasta sebanyak 18.192 orang.

Kemudian berdasarkan status pekerjaan, kepala rumah tangga dalam DTKS, mayoritas adalah buruh industri pengolahan dan buruh lainnya, masing-masing 16%, diikuti usaha sendiri perdagangan dan usaha sendiri lainnya, masing-masing 10%, dengan penghasilan maksimal diperkirakan sebesar UMK. Nilai UMK Kota Tangerang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4,119,029.

Jenis pekerjaan kepala rumah tangga yang lain diantaranya usaha sendiri di bidang buruh jasa kemasyarakatan (8%), pekerja bebas jasa kemasyarakatan dan pekerja bebas lainnya, masing-masing 6%.

Gambar 7a: Status Pekerjaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin

Lapangan usaha ART	Status kedudukan pekerjaan					Grand Total
	Berusaha Sendiri	Buruh/Karyawan Swasta	Pekerja Bebas pertanian	Pekerja bebas non pertanian	Pekerja keluarga	
Pertanian tanaman padi & palawija	194	45	112	41	7	399
Hortikultura	39	55	42	11	2	149
Perkebunan	87	36	30	13	3	169
Perikanan tangkap	82	97	1	10	3	193
Perikanan budidaya	4	20	1	3		28
Peternakan	35	36	5	20	2	98
Kehutanan & pertanian lainnya	38	46	25	23	1	133
Pertambangan/penggalian	21	51		3		75
Industri pengolahan	347	18192	12	513	10	19074
Listrik dan gas	33	197	1	33		264
Bangunan/konstruksi	477	1913	31	1212	3	3636
Perdagangan	5956	3483	7	575	294	10315
Hotel & rumah makan	147	1038	1	49	39	1274
Transportasi & pergudangan	1212	2949	26	916	6	5109
Informasi & komunikasi	20	267		16	1	304
Keuangan & asuransi	7	242		3	2	254
Jasa pendidikan	71	565	3	101	5	745
Jasa kesehatan	41	277	1	29	1	349
Jasa kemasyarakatan. pemerintah	1318	7317	69	3672	37	12413
Pemulung	437	137	4	439	25	1042
Lainnya	5947	15155	74	3339	1181	25696
Grand Total	16513	52118	445	11021	1622	81719

Gambar 7b: Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin

Lapangan usaha ART	Status kedudukan pekerjaan					
	Berusaha Sendiri	Buruh/Karyawan Swasta	Pekerja Bebas pertanian	Pekerja bebas non pertanian	Pekerja keluarga	Grand Total
Pertanian tanaman padi & palawija	155	35	87	35	4	316
Hortikultura	28	15	25	6		74
Perkebunan	72	22	28	10	2	134
Perikanan tangkap	36	31	1	8		76
Perikanan budidaya	3	13	1	1		18
Peternakan	29	24	3	11	1	68
Kehutanan & pertanian lainnya	31	31	15	17		94
Pertambangan/penggalian	9	24		1		34
Industri pengolahan	235	6278	8	169	3	6693
Listrik dan gas	27	120		1	27	175
Bangunan/konstruksi	423	1504	30	962	2	2921
Perdagangan	3750	798	4	311	41	4904
Hotel & rumah makan	85	169		22	8	284
Transportasi & pergudangan	1009	1547	19	692	1	3268
Informasi & komunikasi	10	43		3	1	57
Keuangan & asuransi	4	41		2	1	48
Jasa pendidikan	34	138	1	40	3	216
Jasa kesehatan	25	49		16	1	91
Jasa kemasyarakatan. pemerintahan	980	3306	37	2260	16	6599
Pemulung	325	71	2	315	14	727
Lainnya	3871	6087	48	2188	284	12475
Grand Total	11140	20340	310	7096	382	39249

Komplementaritas Bantuan Sosial (Bansos)

Gambar 8a dan 8b menyajikan proporsi penerima dan komplementaritas program bantuan sosial di tingkat Kota Tangerang. Dari total 248.492 jiwa yang ada di DTKS, sebanyak 153.093 jiwa atau sekitar 61% sebagai PBI JK. Mayoritas PBI JK tersebar di desil 4+ dan desil 2, masing-masing 53.983 dan 32.502 jiwa.

Gambar 8a: PBI-JK Berdasarkan Desil

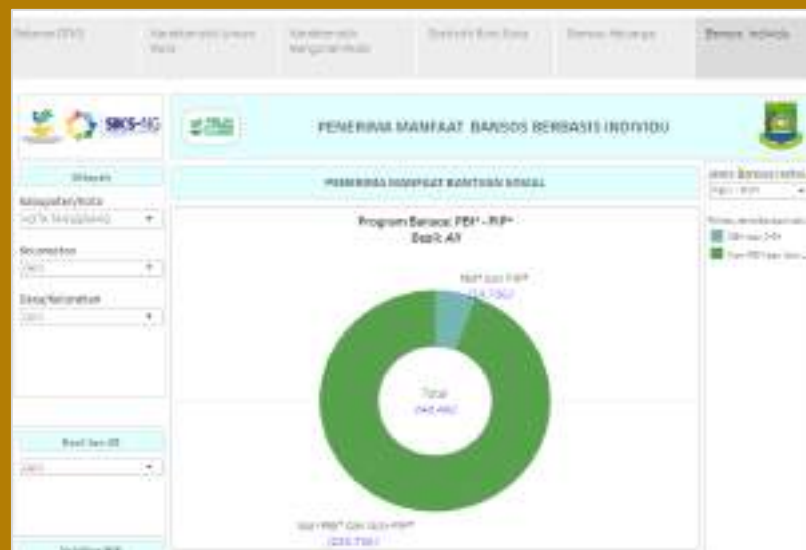


Proporsi penduduk miskin dan rentan yang menerima lebih dari satu program sekaligus memiliki kecendrungan serupa dengan yang ada di tingkat nasional. Seperti terlihat pada gambar 8b, sekitar 33% keluarga dalam DTKS di Kota Tangerang menerima PKH dan BSP sekaligus. Dari total 23.126 keluarga penerima kedua program ini, mayoritas berada di desil 4+ dan desil 2, masing-masing sebanyak 6.444 keluarga (28%) dan 5.605 keluarga (24%).

Sementara, individu dalam DTKS yang menerima PBI dan PIP sekaligus hanya 6%. Dari total 14.736 jiwa penerima kedua program ini, mayoritas berada di desil 4+ dan desil 2, masing-masing sebanyak 4.344 jiwa (29%) dan 3.608 (24%).

Secara teoritis, seluruh penerima PKH sebagai kelompok termiskin berhak menerima BSP dan PBI sekaligus. Penerima PKH yang memiliki anak usia sekolah juga seharusnya menerima PIP.

Gambar 8b: Komplementaritas Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga dan Individu





REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Pemerintah Kota Tangerang perlu aktif melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara periodik sesuai pedoman pemutakhiran data yang telah disiapkan dan disepakati dengan pemerintah pusat melalui Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI.
- Pemerintah Kota Tangerang perlu memanfaatkan DTKS secara lebih luas untuk mendukung perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dan program sektoral di daerah. Tool Dashboard Business Intelligence DTKS yang telah dikembangkan oleh Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI dapat digunakan untuk ini.
- Pemerintah Kota Tangerang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu melakukan pendalaman atas pemetaan dan beberapa temuan di atas dengan melibatkan sumberdaya manusia yang ada di daerah seperti fasilitator SLRT-Puskesmas, potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), dan pendamping kelurahan.
- Pemerintah Kota Tangerang perlu memastikan penerimaan program perlindungan sosial, baik program pusat maupun daerah termasuk yang dikelola oleh pihak non pemerintah, terutama di kelurahan yang jumlah penduduk miskin dan rentan miskinnya besar.
- Pemerintah Kota Tangerang perlu memperkuat mekanisme pemantuan program perlindungan sosial dan penanganan keluhan warga sampai tingkat kelurahan sehingga permasalahan terkait program-program perlindungan sosial dapat ditangani segera dengan baik.
- Pemerintah Kota Tangerang dapat memberikan intervensi berupa program bantuan sosial yang dikelola pemerintah daerah dan/atau pihak lain seperti dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan kelompok filantropis lainnya, kepada rumah tangga dalam DTKS yang tidak menerima program bantuan sosial.
- Pemerintah Kota Tangerang perlu memastikan kelompok yang paling rentan seperti kepala keluarga perempuan berusia di atas 60 tahun yang tidak bekerja dan menderita penyakit kronis menerima bantuan sosial dan/atau layanan kesehatan.
- Berdasarkan pemetaan melalui analisis komplementaritas program perlindungan sosial, Pemerintah Kota Tangerang perlu memastikan kelompok termiskin seperti penerima PKH sekaligus dapat menerima PBI JK dan Program Kartu Sembako atau program sejenis yang dikelola pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya.
- Pemerintah Kota Tangerang perlu melakukan pemutakhiran data untuk Program Kartu Sembako dan PBI JK dan melalui kerjasama antara Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil untuk memperbaiki NIK tidak valid yang jumlahnya masih cukup besar.